

DIGITALISASI MANAJEMEN ASN

(Platform Digital Manajemen ASN / Portal Administrasi Pemerintahan di Bidang Layanan Aparatur Negara)

Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN

Jakarta, 18 Desember 2024

Visi

Misi

Program

Visi
Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045

8

Misi
Asta Cita

17

Program
Prioritas

8

Program
Hasil Terbaik
Cepat

Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

Bersama

Prabowo dan Gibran mengajak Putra Putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama

Indonesia Maju

Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Menuju

Dengan tujuan yang jelas, yaitu

Indonesia Emas

Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat

8 Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 Misi yang disebut **Asta Cita** sebagai berikut:

- 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**PRABOWO
GIBRAN**

BERSAMA INDONESIA MAJU

ASTA CITA 2

26. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui inovasi digital (*digital farming*)
58. Melakukan digitalisasi UMKM
60. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital
61. Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

ASTA CITA 3

9. Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok Masyarakat
12. Mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital
22. Membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata

ASTA CITA 4

37. Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital

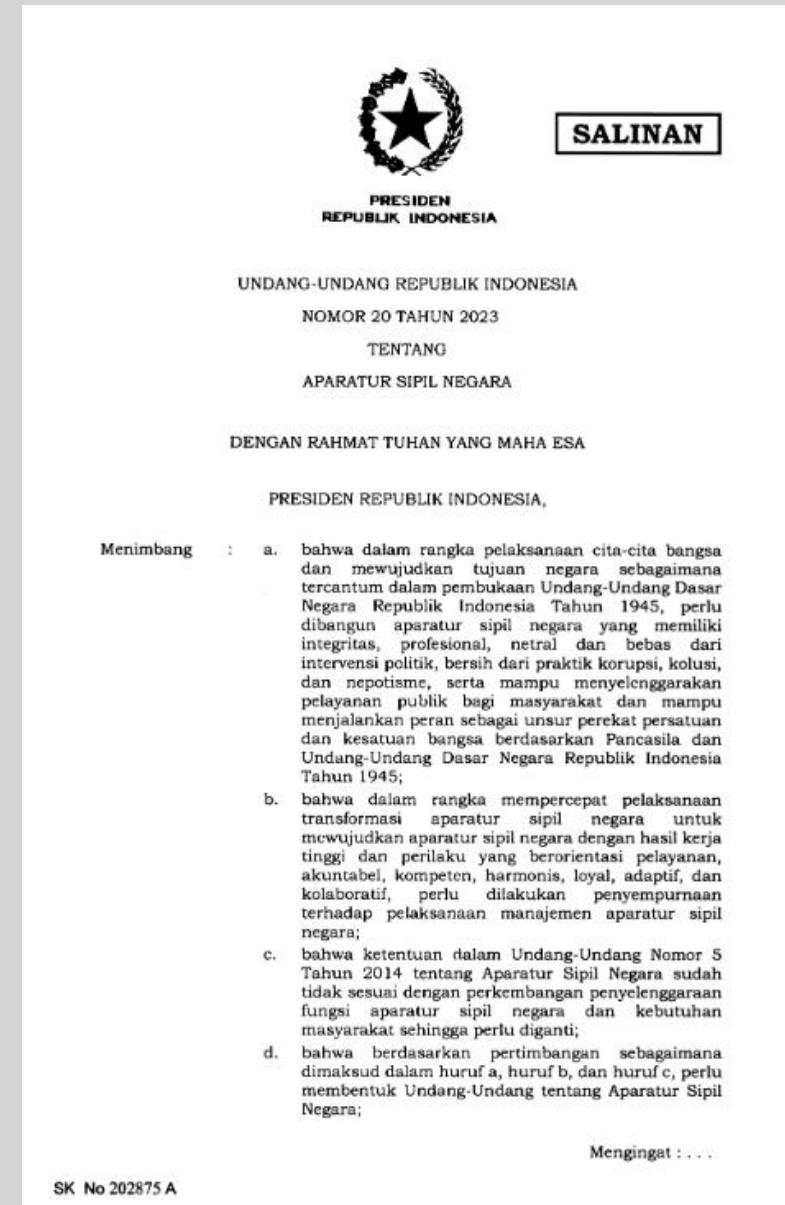
ASTA CITA 7

37. Menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien.
46. Mengembangkan sistem *smart government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

UU ASN

Telah **diundangkan** Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara tanggal **31 Oktober 2023**

Saat ini sedang dilakukan penyusunan Peraturan turunan Undang-undang



Puzzle Penting Transformasi ASN



Revisi UU ASN menjadi **“Puzzle” paling penting** sebagai penggerak puzzle yang lain untuk percepatan **transformasi ASN menuju birokrasi yang profesional dan berkelas dunia**

AGENDA TRANSFORMASI DALAM UU ASN



Pelayanan Publik yang lebih baik dan Masyarakat yang lebih sejahtera

Outcome

Birokrasi yang profesional dan berkelas dunia

Indeks Persepsi Korupsi yang semakin baik

Indeks Efektivitas Pemerintahan semakin baik

1 Transformasi Rekrutmen dan Jabatan ASN

a Fleksibilitas penetapan kebutuhan dan rekrutmen ASN sesuai kebutuhan instansi

b Jabatan disederhanakan menjadi yang lebih terbuka untuk mendukung organisasi *agile* dan kolaboratif.

3 Percepatan Pengembangan Kompetensi

a ASN bukan hanya berhak, tapi wajib mengembangkan kompetensi.

b Instansi wajib memberikan dukungan akses dan sumber daya kepada ASN untuk belajar.

5 Reformasi Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan ASN

a Pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk mencapai sasaran organisasi melalui mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif.

- b**
- ✓ Perbaikan komponen kesejahteraan ASN
 - ✓ Pemberian Pensiun bagi PPPK
 - ✓ Komponen penghargaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran.

2 Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional

a Mobilitas talenta kian mudah dalam satu Instansi, antarinstansi, atau ke luar Instansi.

b Mobilitas talenta untuk mengatasi kesenjangan talenta yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional

4 Penataan Tenaga Non-ASN

a Perluasan konsep PPPK untuk menghindari PHK masal, pembengkakan anggaran, dan penurunan pendapatan.

b Perpanjangan penataan honorer s.d. Desember 2024.

6 Digitalisasi Manajemen ASN

Penyediaan digital *platform* terintegrasi yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, termasuk untuk aktivitas belajar, berkinerja, berkolaborasi, memberikan dan menerima umpan balik, serta pengembangan talenta dan karier.

7 Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

Simplifikasi nilai dasar ASN yang berlaku nasional sehingga menjadi akar budaya kerja yang lebih kuat dalam jangka panjang.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 1

- 3 -

- Manajemen ASN adalah serangkaian **proses pengelolaan ASN** untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Digitalisasi Manajemen ASN adalah **proses Manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data** untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan Manajemen ASN.

BAB XI DIGITALISASI MANAJEMEN ASN

Pasal 63

- Digitalisasi Manajemen ASN dilakukan untuk menjamin **efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN** serta untuk mewujudkan **ekosistem penyelenggaraan Manajemen ASN secara menyeluruh**.
- Digitalisasi Manajemen ASN menyediakan berbagai **layanan digital yang mendukung Manajemen ASN dan terintegrasi secara nasional**.
- Digitalisasi Manajemen ASN sejalan dengan **transformasi organisasi dan sistem kerja ASN**.
- Digitalisasi Manajemen ASN wajib memperhatikan **prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan Siber** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Digitalisasi Manajemen ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 71

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 **dilaksanakan secara nasional paling lama I (satu) tahun** terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Konsep Digitalisasi Manajemen ASN dalam RPP Manajemen ASN

1 Digitalisasi Manajemen ASN **dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB** dan diselenggarakan oleh **K/L yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU ASN.**

2 Dilaksanakan melalui **Platform Digital Manajemen ASN** yang menyediakan **seluruh layanan digital terpadu yang menjadi ruang lingkup Manajemen ASN** serta mengedepankan **otomatisasi proses, berbasis pada kebijakan tata kelola data pemerintah, terintegrasi antar layanan, dan digunakan secara nasional.**

3 Platform Digital Manajemen ASN adalah platform kolaborasi berbasis digital bagi ASN sebagai bagian dari ekosistem digital yang **terintegrasi secara nasional** serta memanfaatkan **Identitas Digital.**

4 Platform diselenggarakan dengan mengacu pada **arsitektur Platform Digital Manajemen ASN** dan memuat seluruh **data Manajemen ASN.**

5 Data pada Platform yang dikelola **BKN**: (1) data profil Pegawai ASN; (2) data perencanaan kebutuhan; (3) data pengadaan; (4) data penguatan budaya kerja dan citra institusi; (5) data pemberian penghargaan dan pengakuan; (6) data layanan dasar kepegawaian; (7) data pengelolaan kinerja; (8) data pengembangan talenta dan karier; (9) data pengawasan penerapan Sistem Merit; (10) data pemberhentian.

6 Data pada Platform yang dikelola **LAN**: data pengembangan kompetensi.

7 Instansi Pemerintah **wajib** menggunakan Platform Digital Manajemen ASN.

Konsep Portal Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara (PLATFORM DIGITAL MANAJEMEN ASN)






Single Sign-On (SSO) pada portal dengan berbasis data kependudukan, melalui pemanfaatan identitas digital (**Digital ID**)

* Layanan administrasi kepegawaian (layanan yang telah operasional di BKN)

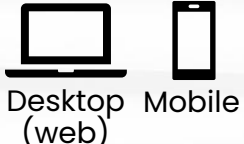
Data Exchange
(Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)

Executive Dashboard

Portal Administrasi Pemerintahan Bidang Aparatur Negara

dengan memanfaatkan sistem informasi eksisting milik    yang sejalan dengan **UU 20/2023** dan pengembangan fitur baru.

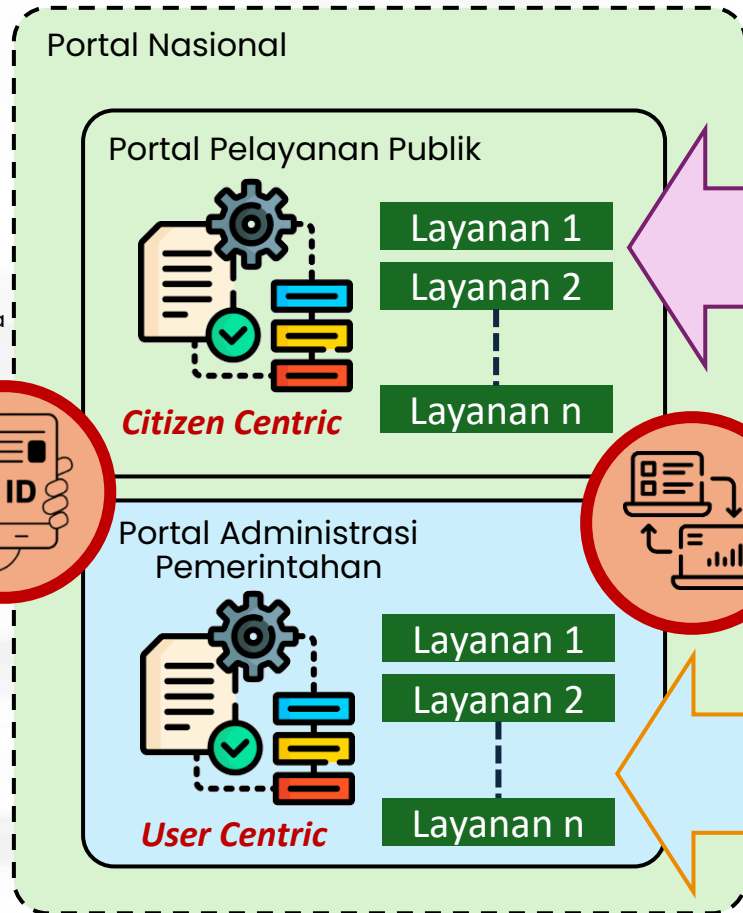
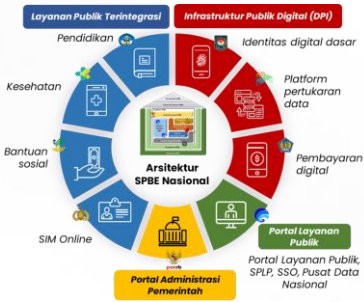
Dapat diakses melalui:



RANCANGAN PORTAL NASIONAL

Portal Pelayanan Publik dan Portal Administrasi Pemerintahan

Perpres 82/2023, mengidentifikasi layanan SPBE Prioritas dengan pondasi **Digital Public Infrastructure** dengan kanal layanan berupa **Portal Nasional (Portal pelayanan publik dan Portal Administrasi Pemerintahan)**



-  Layanan Pendidikan Merdeka Belajar
-  Layanan Kesehatan Satu Sehat
-  Layanan Sosial
-  Layanan Kepolisian Perizinan Penyelenggaraan Event

Data Exchange
(Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)

Telah dilakukan analisis kondisi existing layanan digital:



Tahap awal dimulai dengan "proses bisnis" yang berdampak besar dan telah operasional, berbasis data kepegawaian di BKN dan disiapkan portal nasional administrasi pemerintah

Tantangan: Keterpaduan Layanan Digital Yang Efektif



KONDISI SAAT INI

- ✗ Masyarakat harus mengakses berbagai aplikasi yang rumit & terduplikasi
- ✗ Proses layanan yang masih kompleks, panjang & tidak transparan
- ✗ Kebutuhan "fotocopy KTP" untuk mengakses layanan
- ✗ Pengisian data yang berulang kali untuk mengakses layanan



SEHARUSNYA



Satu Portal



Layanan Proaktif

- ✔ 1 Portal untuk berbagai layanan, dengan akses *single-sign on (SSO)*
- ✔ Proses yang **simpel, cepat, mudah, & transparan**
- ✔ Tidak perlu *fotocopy* KTP. Akses dengan identitas digital untuk **keamanan data pribadi**
- ✔ Satu kali isi data untuk berbagai layanan

Pengembangan Portal

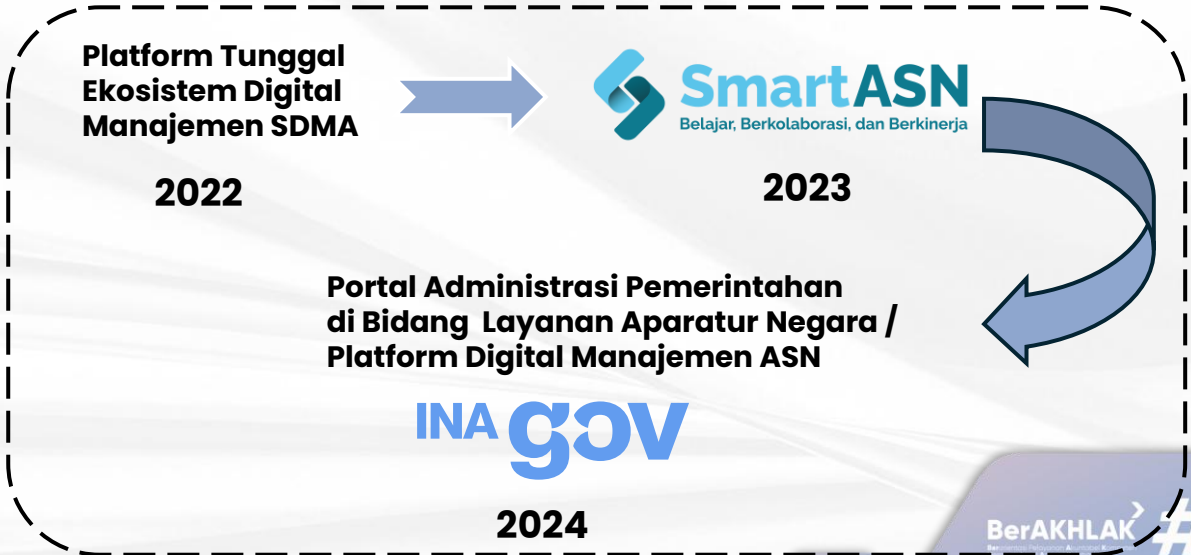
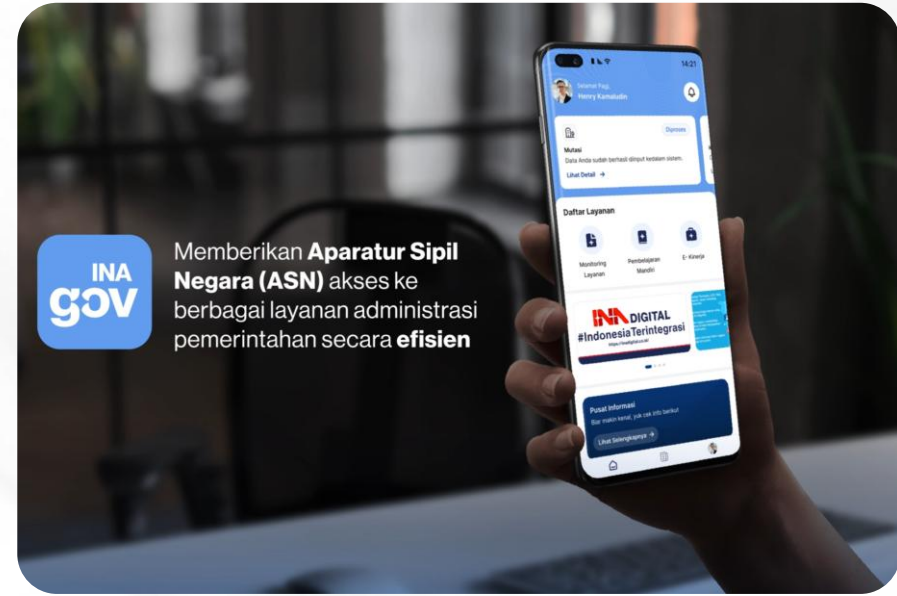
KOLABORASI



Pengenalan Portal Administrasi Pemerintahan Sebagai INAgov

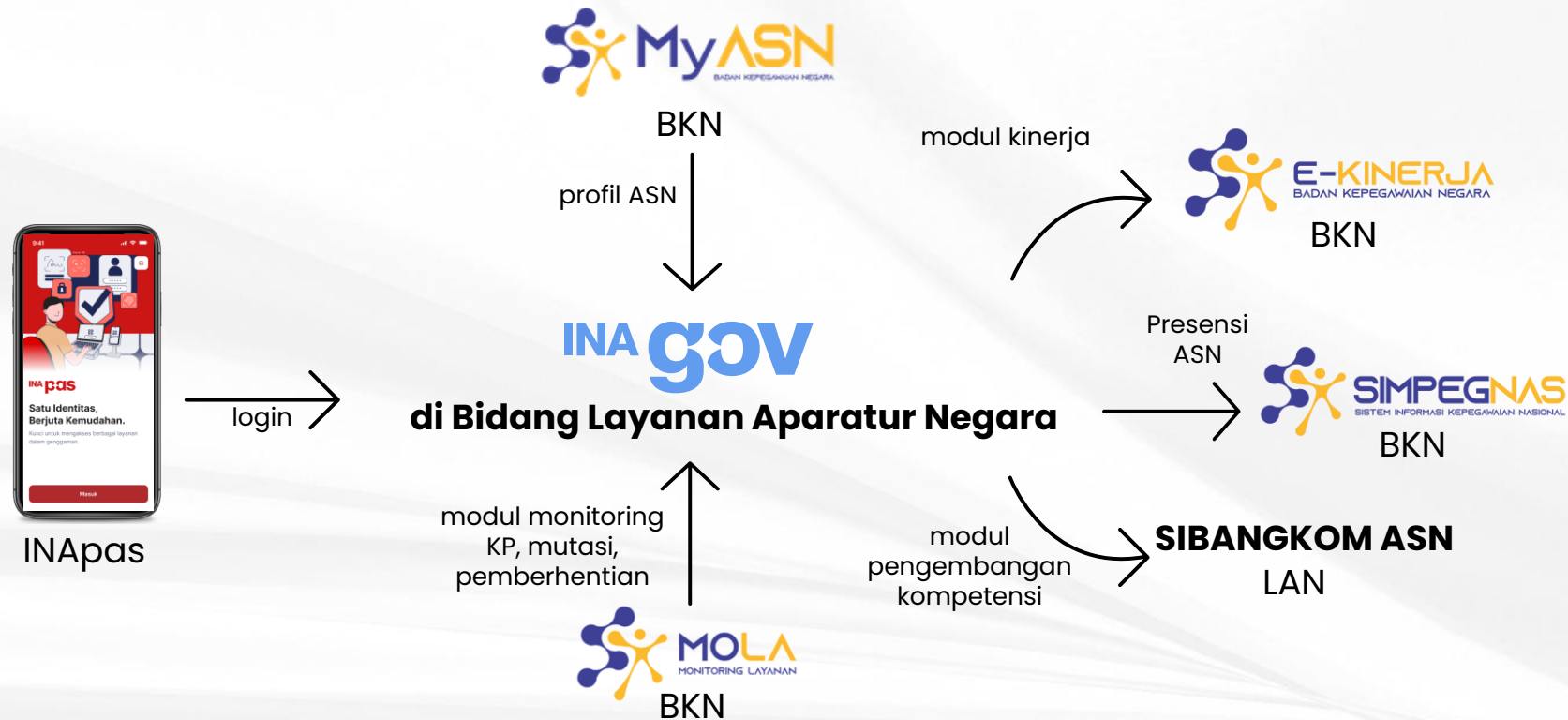


Telah dilakukan rilis terbatas tahap pertama pada tanggal **30 September 2024** dikantor INA Digital oleh Menteri PANRB, Menteri BUMN, dan Menteri Kominfo.



Modul Portal

Saat ini, Portal Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara (Platform Digital Manajemen ASN) sudah terhubung dengan **SIASN, MyASN, E-Kinerja BKN, dan SIBANGKOM ASN LAN**, serta memanfaatkan **INApas** untuk login



✓ Checklist merupakan modul yang tersedia dalam Rilis ke-2

1 Login dengan Digital ID

Terintegrasi dengan INAPASS

2 Pengelolaan Kinerja

3 Pengembangan Kompetensi

4 Layanan Dasar Kepegawaian

5 Pengembangan Talenta & Karier

6 Pemberian Penghargaan & Pengakuan

7 Pemberhentian

8 Pengawasan penerapan sistem merit

9 Penguatan Budaya Kerja & Citra Institusi

10 Perencanaan Kebutuhan

11 Pengadaan

12 Kolaborasi



FITUR DETAIL

✓ Profil ASN: View Data ASN serta Peremajaan Data ASN

✓ Kinerja: Data SKP, Tim Kerja, Pengajuan Angka Kredit, dll

✓ Pengembangan Kompetensi : Pembelajaran Mandiri, Pembelajaran Wajib, Pembelajaran Sosial

✓ Monitoring Layanan : Kenaikan Pangkat, Mutasi, Pemberhentian

✓ Kolaborasi : Media Sosial

✓ Layanan Dasar : Presensi

Digitalisasi Manajemen ASN

Penyiapan *Beta Release* INAGov Layanan Aparatur Negara

Strategi: Portal dibangun bersama INA Digital dengan mengintegrasikan dan menginteroperabilitaskan sistem informasi eksisting milik PANRB, BKN, dan LAN yang sejalan dengan UU 20/2023 tentang ASN dan pengembangan fitur baru serta sejalan dengan Perpres 82/2023 terkait layanan SPBE prioritas.

Ruang Lingkup: Menyediakan modul seluruh layanan manajemen ASN (mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pensiun) secara digital dan berorientasi kepada ASN.

Tahapan Release **INA GOV** Layanan Aparatur Negara

Tahap 1 - **Alpha Release** (30 September 2024)

Fitur yang tersedia:

1. Login menggunakan INA Pas
2. Melihat data Profil
3. Pengelolaan kinerja
4. Pembelajaran mandiri
5. Monitoring kenaikan pangkat
6. Monitoring mutasi
7. Monitoring pemberhentian

Alpha Release sudah diimplementasikan secara terbatas pada **5.066 ASN** di **328 Instansi Pemerintah**.

Tahap 2 - **Beta Release** (Desember 2024)

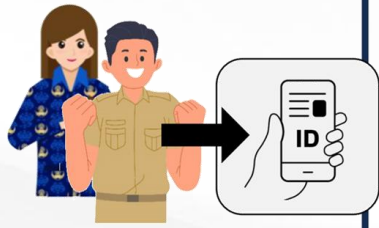
Dengan fitur yang tersedia pada *alpha release* ditambah:

1. Pembelajaran wajib
2. Media kolaborasi ASN
3. Peremajaan data
4. Presensi untuk sistem kerja fleksibel
5. Dashboard/data statistik

Beta Release akan diimplementasikan bertahap secara terbatas pada ASN di seluruh Instansi Pemerintah.



INTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI/APLIKASI EKSISTING YANG TELAH BEROPERASI DI K/L/D



Single Sign-On (SSO) pada portal dengan berbasis data kependudukan, melalui pemanfaatan identitas digital (**Digital ID**)



Cut off data integrasi per-Agustus 2024

TIMELINE INTEGRASI





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Terima kasih

 @kempnrb

 @kemenpanrb

 [www .menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

  @Kementerian PANRB